

TESIS

**KEDUDUKAN PERJANJIAN PERKAWINAN YANG TIDAK
TERCATAT DI CATATAN SIPIL APABILA TERJADI
PERCERAIAN
(Studi Keputusan Mahkamah Agung Nomor : 3405K/PDT/2012)**



Disusun Oleh:

IDA SANJAYA
NIM : 12214081

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NAROTAMA
SURABAYA
2018**

LEMBAR PENGESAHAN

TESIS INI TELAH DI SETUJUI

Pada Tanggal, 16 Agustus 2018

Oleh :
Dosen Pembimbing

(Dr. HABIB ADJIE, SH., M.Hum.)

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Universitas Narotama

(Dr. HABIB ADJIE, SH., M.Hum.)

LEMBAR PENGESAHAN

TESIS INI TELAH DI REVISI
Pada Tanggal, 27 Agustus 2018

Oleh :
Dosen Pembimbing



(**Dr. HABIB ADJIE, SH., M.Hum.)**

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Universitas Narotama

PRO PATRIA



(**Dr. HABIB ADJIE, SH., M.Hum.)**

TESIS

KEDUDUKAN PERJANJIAN PERKAWINAN YANG TIDAK TERCATAT DI CATATAN SIPIL APABILA TERJADI PERCERAIAN (Studi Keputusan Mahkamah Agung Nomor : 3405K/PDT/2012)

Tesis Ini Telah Disahkan oleh Tim Penguji
Pada Tanggal: 16 Agustus 2018

TIM PENGUJI TESIS

Dr. RUSDIANTO SESUNG, S.H., M.H.

KETUA

Dr. HABIB ADJIE, SH., M.Hum.

ANGGOTA

Dr. NYNDA FATMAWATI OCTARINA, S.H., M.H.

ANGGOTA

RINGKASAN

KEDUDUKAN PERJANJIAN PERKAWINAN YANG TIDAK TERCATAT DI CATATAN SIPIL APABILA TERJADI PERCERAIAN

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui rasio dibuatnya perjanjian perkawinan antara suami istri serta untuk mengetahui akibat hukum terhadap perjanjian perkawinan yang tidak dicatat sipil apabila terjadi perceraian. Secara teoritis hasil penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran pada ilmu hukum pada umumnya dan hukum hukum perdata, khususnya yang berkaitan dengan perkawinan

Jenis Penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik deskriptif evaluatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ratio decidendi perjanjian perkawinan dibuat untuk menghindari peraturan sistem yang diatur oleh KUH Perdata yang menganut sistem percampuran harta kekayaan dalam perkawinan. Meskipun terdapat akta perjanjian perkawinan yang bersifat otentik akan tetapi apabila tidak didaftarkan dan dicatatkan di KUA atau Dispendukcapil, maka perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Hal ini sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3405/K/Pdt/2012 tanggal 12 Februari 2014 yang pada pokoknya bahwa perjanjian perkawinan yang tidak dicatat, maka tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga seluruh harta bersama yang ada harus dibagi masing-masing 50% apabila terjadi perceraian. Akibat hukum berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor: 3405 K/Pdt/2012 bahwa perjanjian perkawinan yang tidak dibuat di hadapan notaris atau pegawai pencatat perkawinan maka batal demi hukum, sehingga dalam menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi seluruh harta gono-gini atau harta bersama masing-masing mendapatkan 50% (lima puluh persen)

Kata Kunci: Perjanjian Perkawinan, Catatan Sipil, Perceraian

ABSTRACT

THE POSSIBILITY OF MARRIAGE AGREEMENTS IN CIVIL REGISTRY WHICH HAPPENED DIFFICULTY

The purpose of this study is to determine the ratio of marriage contracts between husband and wife and to know the legal effect of marriage agreement that is not registered by civil in case of divorce. Theoretically the results of this study are to contribute thoughts to the science of law in general and the law of civil law, especially related to marriage

Type of Research in this research is normative law research with approach of legislation. The technique of legal material analysis used in this research is using descriptive evaluative technique.

The results showed that the Ratio decidendi of marriage agreements was made to avoid the regulation of the system regulated by the Civil Code which adheres to a system of mixing assets in marriage. Although there is a marriage agreement certificate that is authentic but if it is not registered and registered at the KUA or Dispendukcapil, then the agreement has no legal force. This is in accordance with the Supreme Court's Decision Number 3405 / K / Pdt / 2012 dated February 12, 2014 which principally states that marital agreements are not recorded, therefore they do not have legal force, so that all existing joint assets must be divided 50% each if there is divorce. Legal consequences are based on the Supreme Court's decision Number: 3405 K / Pdt / 2012 that marriage agreements that are not made before a notary or marriage registrar are null and void, so that in convicting the Plaintiff and Defendant to divide all of these assets or joint assets - get 50% (fifty percent).

Keywords: Marriage Agreement, Civil Registry, Divorce

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda-tangan di bawah ini, saya:

Nama : IDA SANJAYA
NIM : 12214081
Fakultas : Hukum
Program Studi : Magister Kenotariatan
Universitas : Narotama Surabaya
Judul Tesis : **“KEDUDUKAN PERJANJIAN PERKAWINAN YANG
TIDAK TERCATAT DI CATATAN SIPIL APABILA
TERJADI PERCERAIAN”**

(Studi Keputusan Mahkamah Agung Nomor : 3405K/PDT/2012.)”

Bersama ini saya menyatakan bahwa tesis ini bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Magister di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis terdapat dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar acuan/daftar Pustaka. Apabila di kemudian hari di temukan sebaliknya, maka saya bersedia menerima akibat atau sanksi akademis yang diberikan oleh yang berwenang atau Universitas sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 16 Agustus 2018

Yang Membuat Pernyataan,



IDA SANJAYA

Nim: 12214081

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PRASYARAT GELAR | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN PERSETUJUAN | iii |
| LEMBAR PENGESAHAN REVISI | iv |
| LEMBAR PENGESAHAN PANITIA PENGUJI | v |
| SURAT PERNYATAAN | vi |
| RINGKASAN | vii |
| ABSTRAK | viii |
| KATA PENGANTAR | ix |
| DAFTAR ISI | xi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1. Latar Belakang | 1 |
| 2. Rumusan Masalah | 9 |
| 3. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 10 |
| 3.1. Tujuan Penelitian | 10 |
| 3.2. Manfaat Penelitian | 10 |
| 3.2.1. Manfaat Teoritis | 10 |
| 3.2.2. Manfaat Praktis | 10 |
| 4. Originalitas Penelitian | 11 |
| 5. Tinjauan Pustaka | 14 |
| 5.1. Perjanjian Perkawinan | 14 |
| 5.2. Tata Cara Pembuatan Perjanjian Kawin | 17 |
| 5.3. Asas –Asas Perjanjian | 22 |
| 5.4. Dasar Hukum Perkawinan | 24 |
| 5.5. Syarat Sahnya Perkawinan | 25 |
| 5.6. Akta Perjanjian Perkawinan | 28 |
| 5.7. Perbedaan Catatan Sipil dan KUA | 30 |
| 5.8. Kewajiban Suami Istri | 31 |
| 6. Metode Penelitian | 38 |

| | | |
|---------|--|-----|
| 6.1. | Tipe Peneltian | 38 |
| 6.2. | Pendekatan Penelitian..... | 39 |
| 6.3. | Sumber Bahan Hukum..... | 39 |
| 6.4. | Prosedur Pengumpulan dan Analisis Bhan Hukum | 40 |
| 6.5. | Analisis Bahan Hukum | 41 |
| 7. | Sistematika Penulisan..... | 42 |
| BAB II | RATIO DECIDENDI PEMBATALAN PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 3405K/Pdt/2012..... | 44 |
| 1. | Kasus Posisi | 44 |
| 2. | Ratoi Dalam Perjanjian Dalam Perkawinan..... | 47 |
| 3. | Harta Perkawinan Dalam Perjanjian Perkawinan | 51 |
| 4. | Dasar hukum Perjanjian Perkawinan | 66 |
| 5. | Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3405K/Pdt/2012..... | 70 |
| BAB III | AKIBAT HUKUM TERHADAP PERJANJIAN PERKAWINAN YG TIDAK TERCATAT DICATATAN SIPIL APABILA TERJADI PERCERAIAN | 75 |
| 1. | Perjanjian Kawin Sebelum Nikah..... | 75 |
| 2. | Konsep Perjanjian Kawin Dalam Mahkamah Konstitusi | 87 |
| 3. | Konsep Perjanjian Kawin Dalam Mahkamah Agung Nomor 3405 K/Pdt/2012..... | 91 |
| 4. | Akibat Hukum Yang Di timbulkan Dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi..... | 92 |
| 5. | Akibat Hukum Terhadap Perjanjian PerkawinanApabila Terjadi perceraian..... | 94 |
| BAB IV | PENUTUP | 103 |
| 1. | Kesimpulan..... | 103 |
| 2. | Saran..... | 104 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Putusan Mahkamah Agung 3405K/Pdt/2012



BAB IV

PENUTUP

1. Simpulan

- a. Ratio decidendi berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor: 3405 K/Pdt/2012 bahwa perjanjian perkawinan tersebut tidak dibuat di hadapan notaris atau pegawai pencatat perkawinan maka batal demi hukum, sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 147 menyebutkan bahwa perjanjian kawinan harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan dilangsungkan, dan akan menjadi batal bila tidak dibuat secara demikian. Perjanjian itu akan dimulai berlaku pada saat pernikahan dilangsungkan tidak boleh di tentukan pada saat lain untuk itu. Hal ini berarti bahwa ratio decidendi perjanjian perkawinan dibuat di hadapan notaris untuk mendapatkan suatu jaminan kepastian hukum dan sebagai alat bukti yang sempurna. Hal tersebut diwujudkan dalam parameter ideal yurisprudensi seperti latar belakang filosofis (*philosophical background*) yang menuntut hakim untuk menganalisis yurisprudensi yang didalihkan secara filosofis yurisprudensi tersebut. Meskipun terdapat akta perjanjian perkawinan yang bersifat otentik (dibuat oleh notaris) akan tetapi apabila tidak didaftarkan Dispendukcapil, maka perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Hal ini sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3405/K/Pdt/2012 tanggal 12 Februari 2014 yang pada pokoknya

bahwa perjanjian perkawinan yang tidak dicatat, maka tidak memiliki kekuatan hukum.

- b. Akibat hukum terhadap perjanjian perkawinan yang tidak tercatat di catatan sipil apabila terjadi perceraian, Inti perjanjian perkawinan adalah kesepakatan untuk seorang pria dan wanita yang akan menikah untuk memisahkan kepemilikan harta dan hutang piutang, dan kesepakatan tentang sejumlah hal penting lain. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor: 3405 K/Pdt/2012 bahwa perjanjian perkawinan tersebut tidak dibuat di hadapan notaris atau pegawai pencatat perkawinan maka batal demi hukum, sehingga dalam menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi seluruh harta gono-gini atau harta bersama masing-masing mendapatkan 50% (lima puluh persen).

2. Saran

- a. Bagi pasangan calon suami dan istri sebaiknya membuat perjanjian perkawinan, Secara objektif dapat memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang memiliki harta kekayaan lebih banyak dalam perkawinan maka dapat meminimalkan terjadinya sengketa pada saat perkawinan putus.
- b. perjanjian perkawinan dapat dijadikan sarana perlindungan hukum dengan cara melakukan perluasan isi perjanjian perkawinan dengan mencantumkan hal-hal yang dimungkinkan terjadi dalam perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti 2000.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Deni SB. Yuherawan, *Penelitian Hukum*, (makalah disampaikan pada Workshop Metodologi Penelitian Hukum, yang diselenggarakan oleh Prodi Ilmu hukum, Jurusan PMP-KN, Unesa, Surabaya, pada hari Kamis 05 Juni 2014).
- Depag RI, *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah*, Jakarta: Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, 2004.
- Djoko Prakoso, dan I Ketut Murtika, *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Henry Lee A Weng, *Beberapa Segi Hukum Dalam Perjanjian Perkawinan*, Rimbow Medan, Jakarta, 1986.
- Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2003.
- I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017
- Ko Tjay Sing, *Hukum Perdata Jilid I Hukum Keluarga (Diktat Lengkap), Seksi Perdata Barat*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1981.
- Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Cet ke-1, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional*, Cetakan Pertama, Zahir Trading Co, Medan, 1975.
- M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung : Penerbit Alumni, 1986.

Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006.

R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Jakarta: Penerbit Pradnya Paramita, 1980.

R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-undang hukum perdata dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-undang Perkawinan*, Cet. ke-18, Jakarta: pradnya Paramita, 1984.

Ronny Hanitije Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.

Sayuti Thalib. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1982.

Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, 1999.

Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.

Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. 6, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003

Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka. *Perihal Penelitian Hukum*, Alumni, Bandung, 1979

Soetojo Prawirohamidjojo, *Berbagai-Bagai Masalah Hukum Dalam UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Trisakti, Jakarta, 2000.

Solahudin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta : Visimedia, 2008.

Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1989.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur Bandung, Bandung, 2011.

Jurnal/Artikel:

Muhammad Hikmah Tahajjudin, *Perjanjian Kawin Setelah Perkawinan Dan Akibat Hukumnya*, Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.

Lazulfha Perjannah, *Akibat Hukum Akta Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Oleh Notaris Ditinjau Dari Hukum Islam*. Tesis, Fakultas Hukum Unissula, Semarang, 2016.

Nursalyni, *Pencatatan Perjanjian Perkawinan Di Indonesia Yang Dibuat Oleh Pasangan Yang Berbeda Kewarganegaraan Yang Menikah Di Luar Negeri*, Tesis, Universitas Indonesia, Depok, 2012

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Tambahan Lembaran Negara No. 3019 tentang perkawinan dan KUH Perdata.

Putusan MA Nomor 3405 K/PDT/2012

